

Surveilans PTM, Terjadi Penurunan Prokes

WATES (KR) - Kasus penambahan positif Covid-19 di Kabupaten Kulonprogo dalam 10 hari terakhir berasal surveilans epidemiologi Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Meningkatkan kasus Covid-19 di tingkat pelajar ini karena terjadi penurunan perilaku protokol kesehatan (prokes).



KR-Widiastuti

drg Banih Rahayujati.

lah yang belajar dari rumah (BDR) 2 SD 2, 2 SMA, sedangkan yang kelas atau rombongan belajar (rombel) 4 SD, 3 SMP, 1 dan SMA, dan SLB aman," ucap Banih.

"Kasus pada 27 Juli cukup banyak, yakni 16 orang yang berasal dari surveilans PTM," urai drg Banih Rahayujati MKes Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo kepada wartawan, Kamis (28/7).
Terkait surveilans PTM ini hingga 27 Juli jumlah sekolah yang sudah melakukan pemeriksaan SMP ada 4 positif, SMA 10, SD 22, sehingga total positif PTM 36 terdiri 33 siswa dan 3 pendidik, dari 1.704 sampel yang diperiksa. "Pelaksanaan surveilans PTM akan berakhir 2 Agustus, namun ada beberapa sekolah yang menundanya. Dari hasil pelaksanaan tersebut, seko-

Selain kegiatan surveilans PTM, dilakukan pula pemeriksaan antibodi dan survei perilaku. Untuk tes antibodi (kekebalan yang muncul) yang ada di Kulonprogo cukup bagus di angka rata-rata 82 persen. Paling rendah antibodinya justru di level SMA yakni 72 persen, yang lainnya di ang-

ka 87 persen. "Terjadi penurunan perilaku prokes di anak sekolah, di mana untuk SLTA perilaku yang baik hanya 62,86, SMP 72,2, dan SD 58,2. Harusnya yang diharapkan 80 lebih," ujarnya.

Sementara itu, total kasus pada tahun 2022 hingga 27 Juli sebanyak 7.207, yang masih isolasi 55, dan meninggal dunia 101 orang. Tahun 2022 kasus terbanyak ada di wilayah Kapanewon Pengasih, disusul Sentolo. Kasus aktif paling banyak saat ini ada di Kapanewon Nanggulan ada 10 yang masih isolasi, namun semua kapanewon masih ada yang isolasi.

Dijelaskan, kasus di luar PTM adalah dari pelaku perjalanan dan kontak erat. Artinya di masyarakat masih ada yang tertular. Prosentase kontak erat 24,3 persen, pelaku 18,9 persen, suspek (ditemukan sudah bergejala) 29,73 persen, dan PTM 27 persen. (Wid)

TIMNAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN TEMUKAN

Ribuan Keluarga Miskin Ekstrem, Fokus 7 Kapanewon

WONOSARI (KR) - Data Keluarga ekstrem berdasarkan pendataan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2022 di Kabupaten Gunungkidul masih cukup tinggi. Hingga saat ini masih tercatat sebanyak 6.390 keluarga di Gunungkidul masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Ajie Sasono mengatakan, kemiskinan ekstrem merupakan istilah yang baru tahun ini dan sudah ada penanggulangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "Penanganan terus dilakukan dan harapannya pada 2024 mendatang tidak ada

jahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Sedangkan untuk penetapannya mengacu pada pendapatan yang diperoleh masing-masing keluarga. Dengan perhitungan per hari kurang dari Rp11.941 atau Rp 358.233 per orang setiap bulan dan masuk dalam kategori miskin ekstrem. Mengenai peta persebaran keluarga miskin ekstrem, terdapat hampir semua kapanewon. "Meskipun demikian, untuk sasaran program difokuskan untuk 7 Kapanewon Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglihar, Ponjong, Tepus dan Karangmojo," ujarnya.

Diikuti keluarga yang terdata kategori miskin ekstrem tersebut sudah ba-

nyak yang mendapat program dari pemerintah. Terdapat 5.600 keluarga yang mendapatkan bantuan dari program sembako. Selain itu, ada juga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 5.470 keluarga. Karena belum seluruhnya tersasar maka Pemkab Gunungkidul kini menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat guna mencapai target nol keluarga miskin ekstrem di 2024.

"Penanganan program akan terus dioptimalkan dan harapannya target tahun anggaran 2024 seluruhnya teratasi hingga tidak ada lagi keluarga miskin ekstrem tersebut," tuturnya. (Bmp)

DINAS TELUSURI KOPERASI

Terapkan Pinjaman Jasa Tinggi

PANJATAN (KR) - Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kulonprogo, Iffah Mufidati SH menegaskan, pihaknya siap menelusuri keberadaan koperasi yang menerapkan pinjaman dengan jasa tinggi. Selain itu, juga mendorong pembentukan lembaga koperasi di lokasi-lokasi yang banyak rentenir demi meringankan beban peminjam.

Ditegaskan, aktivitas koperasi harus melayani anggotanya dengan baik.

"Menjadi pekerjaan rumah (PR) kami untuk memberikan pemahaman bahwa koperasi harus membantu anggotanya. Untuk lokasi-lokasi yang terindikasi banyak rentenir misalnya pasar tradisional, kita dorong membentuk lembaga koperasi. Dengan demikian, anggotanya bisa terlayani oleh koperasi dengan support dana pinjaman dari perbankan," kata Iffah Mufidati di sela Puncak Peringatan Hari Koperasi



KR-Asrul Sani

Para narasumber menyampaikan materi sarasehan seputar dunia koperasi di Kulonprogo.

Nasional ke-75 di Pantai Mlarangan Asri, Kalurahan Pleret, Rabu (27/7).

Pelaksanaan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75, Dinas Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kulonprogo. Sejumlah acara digelar di antaranya sarasehan dan penyerahan penghargaan dan hadiah lomba.

Diungkapkan, salah satu penyebab warga atau pedagang terjatuh rentenir, karena standar persyaratan pinjaman dari perbankan ma-

sih sulit dijangkau oleh calon peminjam yang menginginkan proses cepat, praktis dan mudah. Sehingga keberadaan koperasi diyakini bisa menaungi sekaligus melayani anggotanya dalam upaya memberantas lintah darat tersebut.

Tentang dugaan ada koperasi menerapkan pinjaman dengan jasa tinggi, mantan Kabag Hukum Setda Kulonprogo tersebut berjanji akan menelusurinya. Apakah jasa yang diterapkan memang benar-benar keing-

inan anggota atau karena hal lain. Sebab penentuan besaran jasa selalu dibahas dalam forum rapat anggota yang disertai regulasi dan kebijakan.

Pihaknya mengingatkan pengurus koperasi agar besaran jasa yang diterapkan tidak memberatkan anggota meski pada akhirnya dikembalikan dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU).

"Kami akan telusuri seberapa besar peran anggota dalam penentuan jasa, bagaimana prosesnya kok malah jadi memberatkan anggota," tegas Iffah.

Disinggung tentang kondisi koperasi di Kulonprogo, Iffah Mufidati mengungkapkan, ada 276 koperasi dan 221 di antaranya aktif sementara 55 sisanya pasif. Koperasi kategori aktif bila menggelar rapat anggota tahunan (RAT), sedangkan yang pasif sudah tiga tahun berturut-turut tidak menggelar RAT. (Rul)

Turun, Penyebaran PMK

PENGASIH (KR) -Penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kulonprogo pascahari raya kurban atau Idul Adha mengalami penurunan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) setempat, Ir Muh Aris Nugroho mengatakan, hingga Senin (25/7) total hewan ternak yang terjangkit PMK sebanyak 1.137 ekor. Dengan jumlah kematian empat ekor, 11 ekor dipotong paksa dan tersisa 384 kasus.

"Untuk angka kesembuhan relatif semakin banyak, 64 persen. Hewan yang dilaporkan sembuh ada 738 ekor," katanya di Aula Adikarto, kemarin.

Adapun rincian hewan ternak yang dilaporkan, yang mati satu ekor domba di Galur dan satu ekor sapi di Samigaluh. Kemudian tambah satu ekor sapi di Sentolo, sehingga total dua ekor sapi yang mati di wilayah tersebut.

"Dinas terus memberikan pengobatan terhadap hewan ternak yang terpapar PMK serta melaksanakan surveilans hari-

an ke sentra-sentra ternak," ujarnya menambahkan Kulonprogo dapat alokasi vaksin tambahan untuk mencegah PMK sebanyak 1.300 dosis.

"Terdiri dari 1.000 dosis untuk vaksin tahap pertama dan 300 dosis tahap kedua. Per-Selasa (26/7), dari 1.000 dosis sudah terealisasi sebanyak 700 dosis. Rinciannya, 500 dosis untuk hewan ternak di Wates, Nanggulan dan Kokap. Kemudian hari ini pemberian 200 dosis menyasar hewan ternak di wilayah Wates, Nanggulan, Panjatan dan Lendah. Sehingga masih tersisa 300 dosis untuk vaksin tahap pertama," ungkap Aris.

Untuk 300 dosis vaksin tahap dua difokuskan di Bendungan, Wates. Karena pemberian vaksin menunggu empat minggu sejak pemberian dosis pertama maka diberikan pada 28 Juli," jelasnya menargetkan pemberian 1.300 dosis vaksin selesai akhir bulan ini. (Rul)

TMMD KE-114 DI GUNUNGKIDUL

Bangun Jembatan dan Jalan Penghubung Desa

WONOSARI (KR) - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-114 yang dilaksanakan Kodim 0730 dilaksanakan di Kalurahan Ngangeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul. Sasaran program TMMD Ke 114 ini adalah pembangunan jalan penghubung desa dan jembatan untuk akses masyarakat wilayah tersebut. Program TMMD tahap II ini digelontor dana Rp 300 juta dengan rincian pembangunan fisik senilai Rp 225 juta dan pembangunan non fisik Rp 75 juta. "Program tersebut direncanakan selesai pada tanggal 24 Agustus 2022 mendatang," kata Dandim 0730/Gunungkidul, Letkol Kav Anton Wahyudo, Rabu (27/7).

TMMD ke-114 tersebut secara resmi telah dibuka Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto di Kawasan wisata Embung Nglanggeran Kapanewon Patuk. Menurut Wabup Gunungkidul Heri Susanto bahwa program TMMD Ke 114 tersebut merupakan kontribusi TNI khususnya Kodim 0730 dalam rangka membantu



KR-Bambang Purwanto

Pembukaan TMMD ke-114 di Kapanewon Patuk.

pemerintah daerah membangun wilayah Gunungkidul. Program TMMD merupakan bentuk nyata keterlibatan TNI ditengah masyarakat dalam rangka membantu pemerintah daerah dan masyarakat secara luas. Karena itu pihaknya berharap dengan adanya program ini, keberlanjutan kerjasama Pemda dan TNI akan terus terjaga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan tema TMMD Dedikasi Terbaik Membangun NKRI. Kami berharap pelaksanaan program ini bisa dirasakan masyarakat," ujarnya. Sementara Komandan

Kodim 0730 Gunungkidul, Letkol Kav Anton Wahyudo menyampaikan bahwa Paddock Nglanggeran Watan Kapanewon Patuk dipilih sebagai sasaran pembangunan karena dinilai layak agar masyarakat lebih dimudahkan dengan akses jalan dan jembatan baru.

Tujuan pembuatan jalan dan jembatan ini agar memudahkan akses transportasi perdagangan serta angkut hasil pertanian masyarakat sekitarnya. Pihaknya akan selalu mendukung akselerasi pembangunan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat Gunungkidul. (Bmp)

Sosialisasi Keimigrasian 'Karyo Masuk Desa'

WATES (KR) - Sebagai upaya mendukung tugas fungsi dan penegakan hukum keimigrasian agar berjalan beriringan dan seimbang, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menggelar sosialisasi 'Karyo Masuk Desa' di Aula Adikarto Kompleks Pemkab Kulonprogo, Kamis (28/7).

Kegiatan sebagai rangkaian peringatan Hari Dharma Karyadhika ke-77 tersebut dibuka Pj Bupati setempat Drs Tri Saktiyana.

"Karyo Masuk Desa Tahun 2022 terdiri tiga kegiatan, seminar keimigrasian, paspor masuk desa dengan metode jemput bola serta layanan informasi dan konsultasi keimigrasian yaitu informasi yang berkaitan

layanan keimigrasian masyarakat di lingkup DIY," kata Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Muhammad Gustur Mudi.

Sosialisasi juga upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Penerbitan Paspor, serta yang utama adalah mengenalkan Layanan Aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor).

"M-Paspor merupakan bentuk baru dari aplikasi pendaftaran paspor online atau APAPO yang diterapkan agar pelayanan paspor lebih transparan akuntabel dan cepat, ini inovasi ter-



KR-Asrul Sani

Pj Bupati Drs Tri Saktiyana mengamati alur pelayanan di Kantor Keimigrasian terutama proses pembuatan paspor.

baru dari Dirjen Imigrasi Kemendikham RI untuk mempermudah pembuatan paspor," jelasnya.

Melalui fitur-fitur unggulan M-Paspor, pihaknya berharap masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat

dalam membuat permohonan paspor. Hal tersebut sesuai komitmen Kemendikham RI khususnya di jajaran keimigrasian dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. (Rul)

KERJA SAMA HM GANDUNG PARDIMAN-BAPETEN

Gelar Diseminasi Pengawasan Pemanfaatan Nuklir

WONOSARI (KR) - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Drs HM Gandung Pardiman MM bekerjasama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) mengadakan Diseminasi Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Indonesia di Aula BMT Dana Insani Wonosari, Selasa (26/7).

Kegiatan yang diikuti warga Gunungkidul untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan tenaga nuklir. "Sosialisasi diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Bahwa nuklir juga memiliki manfaat dan tidak membahayakan. Serta menggali lebih dalam mengenai pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Bapeten merupakan lembaga pengawasan dan



KR-Dedy EW

Drs HM Gandung Pardiman MM bersama undangan dan peserta.

perlu didukung agar melaksanakan tugas dna fungsi dengan baik," kata Drs HM Gandung Pardiman MM.

Kegiatan dihadiri Ketua Yayasan GPC Syarif Guska SH, Wakil DPRD Gunungkidul Heri Nugroho SS, undangan serta ratusan peserta dari masyarakat Gunungkidul. Koordinator Komunikasi Publik Bapeten Abdul

Qohhar menyampaikan presentasi berkaitan dengan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir oleh Baeten dalam melaksanakan tugas.

"Bapeten melaksanakan tugas di antaranya tentang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui peraturan, perijinan dan inspeksi. Selain itu pelaksanaan pengawasan dilakukan de-

ngan membuat sejumlah aturan. "Melalui sosialisasi ini untuk memberikan informasi tentang keberadaan Bapeten agar terjadi hubungan yang akomodatif serta pentingnya keberadaan lembaga pengawasan tyenaga nuklir demi keamanan masyarakat. Sehingga akan terbentuk kesadaran dan persepsi masyarakat tentang energy nuklir secara tepat dan benar," jelasnya.

Ketua Yayasan GPC Syarif Guska Laksana SH menambahkan, sosialisasi menjadi cukup penting bagi masyarakat. Agar memperoleh pengetahuan informasi yang benar tentang pengawasan tenaga nuklir. Sehingga memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat. (Ded)

Mocaf Jadi Produk Unggulan

WONOSARI (KR) - Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini berupa pengembangan Mocaf Gunungkidul dengan tema "Akselerasi Mocaf sebagai Produk Unggulan Kabupaten Gunungkidul".

"Program ini mendorong pengembangan mocaf bisa lebih akseleratif. Sehingga menjadi produk unggulan dan andalan Gunungkidul. Karena itu, diperlukan sinergi dari akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah dan media untuk mengakselerasi pengembangan mocaf," kata Ketua MPM PWM DIY Agus Amin Syaifuddin di Kompleks Pemda Gunungkidul, Rabu (27/7).

Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Gunungkidul serta perwakilan MPM PWM

DIY, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Gunungkidul, dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul. Yuni Hartini Kabag Perekonomian dan SDA menyatakan, strategi yang dilakukan diantaranya Literasi dan edukasi mocaf yang lebih luas kepada masyarakat. Termasuk jejaring pemasaran, membuat kebijakan yang berpihak pada pengembangan panan lokal, branding mocaf yang lebih massif dan mendorong tempat pengolahan mocaf menjadi destinasi wisata. Sedangkan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul Rismiyadi menuturkan, lahirnya inovasi teknologi ubi kayu menjadi mocaf membuka peluang bisnis potensial serta keberadaannya merupakan alternatif bagi industri pengolahan makanan nasional yang memperhatikan. (Ded)